

**PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP
PROFESIONALISME PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI
(Studi Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Trucuk)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Peminatan:
Akuntansi Sektor Publik



Diajukan Oleh:
LINA DWI MARYANI
NIM. 1522100913

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WIDYA DHARMA
KLATEN
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP
PROFESIONALISME PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN
PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(Studi pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Trucuk)**

Diajukan oleh:

LINA DWI MARYANI

NIM: 1522100913

Telah disetujui pembimbing untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Widya Dharma

Pada tanggal:

Pembimbing I



Oki Kuntaryanto, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN. 001807901

Pembimbing II



Cahaya Nugrahani, S.E., M.Si.
NIDN. 0605017702

Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi



Agung N Jati S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA.
NIDN. 0620017001

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP
PROFESIONALISME PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN
PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(Studi pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Trucuk)**

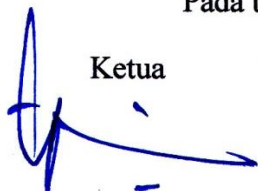
Diajukan oleh:

LINA DWI MARYANI

NIM: 1522100913

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma
dan diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi
Pada tanggal:

Ketua



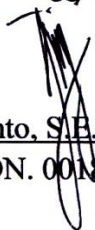
Dr. Sutrisno Badri, M.Sc.
NIDN. 0207055601

Sekretaris



Agung N Jati S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA.
NIDN. 0620017001

Anggota



Oki Kuntaryanto, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN. 001807901

Anggota



Cahaya Nugrahani, S.E., M.Si.
NIDN. 0605017702

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Sutrisno Badri, M.Sc.
NIDN. 0207055601

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lina Dwi Maryani

NIM : 1522100913

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah skripsi yang berjudul, “Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Desa dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Trucuk)” adalah benar-benar karya sendiri dan bebas dari plagiat. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam penelitian ini telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti ada penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, Mei 2019



Lina Dwi Maryani

NIM. 1522100913

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk:

1. Orang tua saya tercinta Bapak Subarto dan Ibu Karni serta kakak saya Lia Rahayu dan adik saya Leny Astri Yuliana dan keluarga besar saya yang tanpa lelah memberikan doa dan dukungan tanpa henti dalam hidup saya.
2. Mas Hery yang selalu ada, selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada saya serta membantu setiap proses yang saya lewati.
3. Dzakii Ahnaf Alfattah dan Alfarizi Hisyam Alfattah kesayangan saya yang menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat tersayang Ana Marlina yang telah memberikan semangat dan motivasi.
5. Sahabat saya “Manis Manis Manja” (Ririn, Noora, Lita, Linda, Nindy, Wulan, dan Mundha) telah mengajarkan banyak hal dan memberikan semangat untuk tidak putus asa.
6. Sahabat saya “Kembali ke Jalan yang Benar” (Miftah, Ratna dan Anike) yang selalu ada ketika saya berproses, selalu ikhlas menerima segala keluh kesah saya dan saling menguatkan, kalian luar biasa.
7. Teman-teman Mahasiswa Akuntansi Universitas Widya Dharma Klaten Angkatan 2015 yang selalu berjuang bersama.
8. Dan untuk semua teman, sahabat, dan saudara saya yang telah mendoakan dan mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan ridha dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Desa dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Trucuk)” ini dengan baik dan lancar. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten. Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Triyono, M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Dharma Klaten.
2. Bapak Dr. Sutrisno Badri M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma.
3. Bapak Agung Nugroho Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
4. Bapak Oki Kuntaryanto, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Cahaya Nugrahani, S.E., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Orang tua dan saudara saya beserta keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dan doanya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di sini, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semua bantuan yang telah diberikan menjadi amal di sisi Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi

yang membaca. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini penulis ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Klaten, Mei 2019

Lina Dwi Maryani

NIM. 1522100913

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Teori Stewardship.....	9
2. Keuangan Desa.....	11
3. Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Desa.....	12
4. Peran Perangkat Desa.....	22
5. Partisipasi Masyarakat.....	23
B. Rerangka Penelitian.....	26
C. Hipotesis Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis dan Sumber Data.....	31
B. Populasi dan Sampel.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33

D. Definisi dan Pengukuran Operasional Variabel.....	33
E. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
B. Gambaran Umum Responden.....	43
C. Proses Pengumpulan Data.....	44
D. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	45
E. Uji Statistik Deskriptif.....	47
F. Uji Instrumen.....	48
1. Uji Validitas.....	48
2. Uji Reliabilitas.....	51
G. Uji Asumsi Klasik.....	52
1. Uji Normalitas.....	52
2. Uji Heteroskedastisitas.....	53
H. Uji Hipotesis.....	54
I. Uji Koefisien Determinasi.....	57
J. Pembahasan.....	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Simpulan.....	60
B. Keterbatasan.....	61
C. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hak dan Kewajiban Desa.....	11
Tabel 3.1	Definisi dan Pengukuran Operasional Variabel.....	35
Tabel 4.1	Data Statistik Responden.....	43
Tabel 4.2	Hasil Pengumpulan Data.....	44
Tabel 4.3	Descriptive Statistics.....	47
Tabel 4.4	Uji Validitas Peran Perangkat Desa.....	49
Tabel 4.5	Uji Validitas Partisipasi Masyarakat.....	50
Tabel 4.6	Uji Validitas Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Desa.....	51
Tabel 4.7	Hasil Uji Reliabilitas.....	52
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas.....	53
Tabel 4.9	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	53
Tabel 4.10	Hasil Regresi Linier Sederhana.....	55
Tabel 4.11	Hasil Uji Nilai Selisih Mutlak.....	56
Tabel 4.12	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Rerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Ijin Penelitian
Lampiran 2	Kuesioner
Lampiran 3	Tabulasi Data
Lampiran 4	Descriptive Statistics
Lampiran 5	Hasil Uji Validitas
Lampiran 6	Hasil Uji Reliabilitas
Lampiran 7	Hasil Uji Asumsi Klasik (Normalitas, Heteroskedastisitas)
Lampiran 8	Hasil Uji Regresi

ABSTRAK

LINA DWI MARYANI, 1522100913, 2019. “Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Desa dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Trucuk)”.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Desa dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Trucuk. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, diperoleh 54 responden yang memenuhi kriteria sampel penelitian ini. Metode analisis yang digunakan antara lain uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas dan uji heterokedastisitas, uji hipotesis menggunakan metode regresi sederhana dan uji selisih mutlak dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap profesionalisme pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat tidak memoderasi pengaruh peran perangkat desa terhadap profesionalisme pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Peran perangkat desa, partisipasi masyarakat dan profesionalisme pengelolaan keuangan desa.

ABSTRACT

LINA DWI MARYANI, 1522100913, 2019. "The Influence of the Role of Village Devices on Village Financial Management Professionalism with Community Participation as Moderating Variables (Study on Village Government in Trucuk Sub-District)"

The purpose of this study is to find out the influence of the role of the village apparatus on village financial management professionalism with community participation as a moderating variable in the village administration in Trucuk sub-district. Sample selection using purposive sampling technique, obtained 54 respondents who met the sample criteria of this study. The analytical methods used include validity test, reliability test, classic assumption test includes normality test and heterocedasticity test, hypothesis testing using simple regression method and absolute difference test and test coefficient of determination. The results of the study show that the role of village officials influences the professionalism of village financial management and community participation does not moderate the influence of the role of village officials on the professionalism of village financial management.

Keywords: Role of village officials, community participation and professionalism of village financial management.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Pamuji et al, 2017).

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tanggal 15 Januari 2014. Undang-Undang tentang Desa dibuat untuk menggantikan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan desa yang sudah ada sebelumnya. Pasal 23 UU No. 6 Tahun 2014 memberikan penegasan bahwa pemerintah desa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Dari sisi regulasi,

desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desanya di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta

perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Selain diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Indrianasari (2017) melakukan penelitian mengenai Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukondo). Hasil penelitian menunjukkan perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Faridah dan Suryoko (2015) menyatakan bahwa pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu kemampuan menjawab dan konsekuensi. Komponen

pertama (istilah yang bermula dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Penelitian yang dilakukan Faridah dan Suryoko (2015) mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Hasil penelitian yaitu Kepala Desa di Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDesa tahun anggaran 2013. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.

Amanat untuk pengembangan partisipasi masyarakat desa tertuang di dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, salah satunya yaitu mendorong praksara, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Materi muatan Undang-Undang Desa Tahun 2014 memuat banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Pasal 3 secara tegas menyebutkan bahwa pengaturan desa salah satunya berasaskan pada asas partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan, kemudian di

dalam pasal 4 huruf d mencantumkan bahwa pengaturan tentang desa bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, bahkan didalam pasal 68 ayat (2) huruf e bahwa masyarakat wajib berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa (Pamuji et al, 2017).

Riyanto (2015) meneliti mengenai Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak Pemerintahan Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Faktor pendukung pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat.

Pasal 82 ayat (5) UU Desa menyebutkan bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan pembangunan desa, maka masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Musyawarah desa merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. UU menjadi instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Baik UU desa maupun peraturan pelaksanaannya mencantumkan bahwa roda penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan desa diawali dengan musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan

asas-asas tersebut dipergunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes) yang baik (*good governance*) terkait pengelolaan ADD memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan ADD. Untuk itu perlu peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif.

Pemerintah dituntut untuk menyajikan laporan yang berkualitas guna mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oknum-oknum yang bersangkutan, sehingga perlu adanya profesionalisme pengelolaan keuangan daerah. Profesionalisme dilihat dari sudut pandang kinerja instansi pemerintah daerah yaitu bagaimana pemerintah daerah mampu dalam mengelola pemerintahan secara profesional dalam hal ini pengelolaan keuangan (Tudikromo, 2015). Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Sukmaningrum, 2012).

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan desa Kecamatan Trucuk. Sebagai anggota masyarakat di Kecamatan Trucuk peneliti ingin mengetahui apakah aparatur pemerintahan desa yang dipercaya bertindak

sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu akuntabel dan transparan. Sebagai anggota masyarakat di Kecamatan Trucuk peneliti memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumberdaya yang dipercayakan kepada pemerintah desa dan tiap-tiap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Desa dengan Partisipasi Masyarakat sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Trucuk)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap profesionalisme pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh peran perangkat desa terhadap profesionalisme pengelolaan keuangan desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap profesionalisme pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk menguji apakah partisipasi masyarakat memoderasi pengaruh peran perangkat desa terhadap profesionalisme pengelolaan keuangan desa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

1. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai bahan masukan bagi perangkat desa untuk memperbaiki masalah yang ada dalam menciptakan profesionalisme pengelolaan keuangan desa agar program desa dapat memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat desa dan menjadi salah satu pilar pembangunan infrastruktur dasar desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini dilakukan di desa pada Kecamatan Trucuk dengan responden perangkat desa. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap profesionalisme pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat diketahui dari hasil koefisien regresi nilai signifikansi peran perangkat desa sebesar 0,000 lebih kecil dari α 0,05, yang berarti bahwa perangkat desa telah berperan dalam profesionalisme pengelolaan keuangan desa dan telah sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu akuntabel dan transparan.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memoderasi pengaruh peran perangkat desa terhadap profesionalisme pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat diketahui dari hasil koefisien regresi nilai signifikansi sebesar 0,590 lebih besar dari α 0,05, yang mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program yang dijalankan pemerintah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/ kebijakan publik tidak berdampak pada pengaruh peran

perangkat desa terhadap profesionalisme pengelolaan keuangan desa artinya adanya partisipasi masyarakat tidak serta merta dapat meningkatkan peran perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan kuesioner, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol responden dalam menjawab seluruh instrument penelitian dan akibatnya ada sebagian kuesioner yang tidak bisa digunakan sebagai sampel karena tidak menjawab instrument penelitian secara lengkap.
2. Penelitian hanya terbatas pada dua faktor yang mempengaruhi profesionalisme pengelolaan keuangan desa, yaitu peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Desa
 - a. Sebagai bahan masukan bagi perangkat desa untuk memperbaiki masalah yang ada dalam menciptakan profesionalisme pengelolaan

keuangan desa agar program desa dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

- b. Perlunya sosialisasi akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menunjang tata kelola pemerintahan desa yang baik.
 - c. Perlunya pemerintah desa membuat *website* agar masyarakat/pengguna laporan keuangan lebih mudah dalam mengakses laporan keuangan desa.
 - d. Pemerintah desa perlu mengadakan bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan akuntansi pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang berkaitan dengan keuangan desa dan agar dana desa lebih tepat sasaran dalam meningkatkan perekonomian desa.
2. Bagi peneliti selanjutnya
- a. Kuesioner penelitian lebih menyesuaikan kondisi nyata dan kemampuan perangkat desa, serta memastikan jawaban dari responden agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penyusunan kalimat dalam kuesioner yang digunakan lebih disederhanakan guna mempermudah pemahaman perangkat desa terkait pernyataan yang disampaikan.
 - b. Pengumpulan data dalam penelitian tidak hanya menggunakan kuesioner namun juga menambah teknik pengumpulan data misalnya dengan menggunakan wawancara.

- c. Menggunakan atau menambah variabel penelitian agar dapat mengetahui dengan jelas faktor yang mempengaruhi profesionalisme pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfasadun, et al. 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Prospiding SENDI-U 2018.*
- Dewanti, Elsa D.W. 2015. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng. Skripsi.* Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.
- Domae, Tjajanulin. 2011. *Sound Governance, Meningkatkan Kapasitas Kelompok Miskin dan Mengadpokasi Pemerintah Desa.* Universitas Berawijaya: Press (Ub Press).
- Faridah dan Suryoko S. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 4, No 5.*
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Menggunakan Program IBM SPSS 19.* Badan Penerbitan: Universitas Diponegoro Semarang.
- Indrianasari, Neny T. 2017. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan, dan Pajak. Vol. 1. No 2.*
- Kumalasari, Deti dan Ikhasan Budi R. 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 5, No 11.*
- Laksana, Nuring S. 2013. *Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol 1 No 1.*
- Lalolo, Krisna Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi.* Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Edisi Empat. Yogyakarta: Andi.

- Novindra, et al. 2017. Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. FEB Universitas Muhammadiyah Magelang
- Nurgiyantoro, B, Gunawan dan Marzuki. 2004. *Statistik Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pamuji, et al. 2017. Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL.24*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Purwaningsih, Ernawati. 2008. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jantra Vol III No 6*.
- Rahayu, Ni K. Y. Sinarwati dan Wahyuni. 2017. Analisis Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar. *E-journal SI Ak Vol 8 No 2*.
- Rasyid, M. Ryaas. 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI Press.
- Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara. *Ejournal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 1*.
- Sekaran, U dan Roger B. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 6 Buku 1. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- _____. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 6 Buku 2. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2007. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugista, Rizky A. 2017. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa di Kabupaten Lampung Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.

- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Supomo dan Indiantoro. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE Yogyakarta.
- Sutrawati, Kadek. 2016. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Halu Oleo Kendari.
- Tudikromo, Andina M. 2015. Pengaruh Profesionalisme dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dimoderating dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Pasundan Bandung.
- Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa 2014.
- Wahyudin, Agus. 2015. *Metode Penelitian Bisnis dan Pendidikan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Negeri Semarang.
- Wardana, Ibnu. 2016. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Studi Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Magelang . *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Widodo, et al. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Widiyanti, Arista. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Wulandari, Sari. 2018. Pengaruh Sumber Daya Aparatur Desa, Peran Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, Aksesibilitas, Penyajian Laporan Keuangan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Widya Dharma.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>